PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

Serang, 16 Agustus 2024

Nomor : B - 100.3.2/ 2133 /Huk/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Serang

Dalam rangka evaluasi terhadap Keputusan DPRD Nomor 161-30 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 100.3.1.2/Kep.330-Huk/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, Kami mengharapkan agar Saudara dapat hadir dalam rapat pembahasan yang akan diselenggarakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	20 Agustus 2024.
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Acara	:	Evaluasi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut agar masing-masing mempersiapkan data dan progres terkait dengan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 atau Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Pemerintahan Umum
Dan Kesejahteraan Rakyat,

Dr. Komarudin, M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 197007211991011002

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Banten;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Banten;
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten; Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
16. Akhmad Syaefullah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
17. Susi Rusiyamah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
18. Sofa Rauanda Shofra, S.H., Sp.1., M.A. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
20. Sarbinawati, S.H., M.Si. (Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
21. Didi Sohidi Tohir,Sh,MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
22. Ita Yulistiawati, S.H., M.Si. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
23. Dewi Yanti Arhentine, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
24. Sri Yulianti, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
25. Reza Thareeq Akbar, S.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
26. Iin Sulhiah, SE (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
27. Hasan Bisri (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
28. Rahadyanto, S.Kom,M.Si (Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

DAFTAR HADIR

RAPAT EVALUASI TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hari/Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2024
Acara : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten

No.	NAMA	Jabatan/Instansi	L/P	Tanda tangan			
1	2	3	4		5		6
1	PH. Haro			1	.....		
2	Abdyaeffilah	Perancang perdam	L			2	.....
3	Ulfah	DP3AKKB		3	.....		
4	Iwan Ridwan	Set DPRD				4	.....
5	Rishan	DP3AKKB	L	5	.....		
6	Liliani Budiyanto	Dinas Kesehatan	P			6	.....
7	TANTI. F	kanwil kumham	P	7	.....		
8	Berti	11	P			8	.....
9	Fergy. F	Ka Bagian	L	9	.....		
10	Firman	Disporasi				10	.....
11	ENDANG M.	Disporasi		11	.....		
12	Dwi M.	Disporasi				12	.....
13	Novy Dwi R.A	DP3AKKB		13	.....		
14	Dhani Darmiati, A	Kasi hukum	L			14	.....
15	ADITIA.F	DP3AKKB		15	.....		
16	Adang Abdurah	Disnakertrans				16	.....
17	Yudha.P	Dkukm		17	.....		
18	Abdul Lathif	Diskoperindag				18	.....
19	Ratu Puspitasari	DLHK prov Banten		19	.....		
20	Ismiyanti TPB	-11-				20	.....

No.	NAMA	Jabatan/Instansi	L/P	Tanda tangan			
1	2	3	4		5		6
21	Lia	DLHK		21			
22	YANTO	BPBD	L			22	
23	Ikram Wahdi	Biro ORB	L	23			
24	Martuh Z	DPRKP				24	
25	WAHYANTO	DPRKP		25			
26	Agus P	Biro Hukum				26	
27	Wiga	— " —		27			
28	Sofa Rwanda S.	— " —				28	
29	Asep Gunandar	— " —		29			
30	Yesaya S	DPBD				30	

31. Yeppy.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

AKHMAD SYAEFULLAH, S.H.
NIP. 19780511 200112 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. 200520

NOTULEN

Rapat : Rapat Evaluasi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024

Tempat : Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Waktu Rapat : 09.00 WIB - Selesai.

Acara :
1. Pembukaan
2. Pembahasan

Peserta Rapat :
1. Plt. Kepala Biro Hukum
2. Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Banten
3. Bapak Ferry Fathurokhman, Ph.D (Dekan FH Untirta)
4. Bapak Tb. Iwan Ridwan (Sekretariat DPRD Provinsi Banten)
5. Unsur Kanwil Hukum dan HAM Banten
6. Unsur Dinas Perkim Provinsi Banten
7. Unsur BPBD Provinsi Banten
8. Unsur DP3AKKB Provinsi Banten
9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Banten
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Banten
11. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
13. Tim Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Banten

1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ibu Susi Rusiyamah, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten)

2. Pembahasan : **Pak Ferry Fathurokhman (Untirta)**
1. Banten termasuk yang produktif, ada 14 propemperda di tahun 2024
2. Ada 7 raperda usul Gubernur dan 7 raperda usul DPRD
3. Ini sudah bulan agustus, bagaimana evaluasinya?
4. Ada 3 tahapan dalam evaluasi ini yaitu :
   - Jangka pendek (formulation)
     Apakah sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ex juknis no. 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019?
   - Jangka menengah (Operating)
   - Jangka panjang (Comprehensive Evalution)
     Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
5. Karena ini evaluasi, kadang-kadang ada perda mubazir tidak efektif karena tidak direncanakan dengan baik
6. Dalam praktek banyak perda yang tidak jalan dibawah maka perlu instrumen sesuai dengan analisa kebutuhan perda
7. Dalam praktek juga ada perda karena dinamika politik
8. Untuk perda yang dijalan tidak bisa dilaksanakan harus dievaluasi
9. Apakah harus dirubah atau perlu dicabut harus melalui kajian yang komprehensif.

Bu Susi

1. Propemperda ada 14 raperda yang diusulkan
2. Ada 3 yang sudah diundangkan
3. 2 raperda proses fasilitasi di kemendagri
4. 1 raperda proses evaluasi di kemendagri
5. Raperda yang sudah dalam proses di kemendagri inginnya dewan bulan ini selesai (akhir agustus)
6. 3 raperda proses pansus
7. Sisanya beberapa yang masih di opd
8. Raperda usul Gubernur tinggal 1 yang belum di opd nya
9. Untuk peopemperkada, dari 77 usulan opd baru 8 yang jadi Pergub
10. Sisanya bagaimana?
11. Apa yang jadi kendalanya?
12. Apakah sudah tidak menjadi prioritas lagi?
13. Apakah ada perubahan kebijakan?
14. Kenapa sampai bulan agustus belum diajukan ke biro hukum?

Pak Iwan

1. Tahun 2024 pemprov menetapkan 14 propemperda
2. Dari 14 raperda ada 3 yang sudah diundangkan
3. 2 raperda proses fasilitasi kemendagri
4. 1 raperda proses evaluasi kemendagri
5. 3 raperda masih proses pembahasan pansus
6. 5 raperda belum dibahas sama sekali
7. Kalau dihitung kondisi per agustus di angka 57 %
8. Kita sulit sekali pada posisi ideal dalam pembentukan perda karena hambatannya cukup banyak
9. Sebelum masuk propemperda sebaiknya mengikuti 3 metode dulu yaitu :

- Penentuan skala prioritas
- Identifikasi kebutuhan
- Analisis kebutuhan perda

10. Sebelum masuk propemperda kita godog dulu diintern sebelum masuk DPRD
11. Raperda penyiaran termasuk raperda yang sulit karena tidak ada delegasinya tapi menjadi kebutuhan daerah karena disitu ada potensi ekonomi, penyerapan tenaga kerja,budaya daerah maka perda ini harus diperjuangkan
12. Perda pemajuan kebudayaan, basisnya aspirasi masyarakat (perda 7/2023)
13. Raperda jaminan sosial ketenagakerjaan, sudah dilakukan kajian mendalam, NA sudah jadi dan sudah masuk bapemperda maka kita dorong bisa dibahas dan diselesaikan di tahun 2024, ini penting karena jaminan ini untuk perlindungan juga mencegah kemiskinan baru
14. Raperda perlindungan anak sudah proses kemendagri
15. Raperda ekonomi kreatif terbentur padatnya jadwal komisi 2
16. Raperda limbah medis, masih diskusi belum selesai antara Dinkes dengan DLHK siapa yang bertanggung jawabnya

    Rencananya besok akan konsultasi ke kemendagri, akan mendengar fatwa kemendagri akan lanjut atau tidak.

Bu Susi

1. Sebenarnya tahun 2021 sudah melakukan analisis kebutuhan perda
2. Dari 77 rapergub yang masuk propemperkada, baru 9 yang selesai
3. Untuk propemperda dan propemperkada kalau bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun
4. Ketika diusulkan ke biro hukum dilengkapi kajian yang sistematikanya lengkap

Bu Sofa

1. Dari 77 rapergub ada 26 OPD/Biro yang mengusulkan di tahun 2024
2. Baru 9 pergub yang selesai
3. Capaian masih diangka 27 %

BPBD

1. Dari 6 usulan pergub, 2 yang sudah selesai, 4 lagi akan di tahun depan

DP3AKKB

Rapergub RAD harusnya sudah selesai tapi masih ada kendala yaitu ketua gugus tugas harus disesuaikan

Dishub

Ada 4 usulan rapergub, tahun ini insya Allah bisa

selesai

Dindik

Sesuai arahan tidak perlu merubah pergub tapi cukup juknisnya saja yang dirubah

Dinkes

Masih menunggu rencana aksi nasionalnya

Dispora

Belum ada pergerakan, masih berupa judul
Aturan diatasnya sudah banyak yang berubah
Insya Allah tahun ini selesai karena di UPT sedang dibahas untuk pembinaannya

Kabag Peraturan Perundang-undangan

1. Karena ini evaluasi, sebenarnya hari ini ingin ada pernyataan kesanggupan dari masing-masing OPD
2. Kalau tidak bisa atau tidak sanggup diselesaikan di tahun 2024 akan kita ubah SK nya

Kanwil Tanti

1. Komitmen dari OPD untuk membuat aturan yang dibutuhkan
2. Jangan pernah takut membuat aturan
3. Ketika ada kesulitan bisa diskusi ke biro hukum atau kanwil
4. Perlu perencanaan juga karena terkait anggaran
5. Ada keterkaitan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya
6. Harus ada keterangan atau penjelasan, tidak perlu yang terlalu formil, cukup pakai bahasa sendiri dulu nanti akan disempurnakan oleh biro hukum atau kanwil

Plt Karo Hukum

1. Usulan raperda dan rapergub oleh OPD
2. Sampai dengan bulan agustus pergub yang selesai baru 27%
3. OPD agar bersurat kalau tidak sanggup menyelesaikan di tahun ini agar dibuat SK yang baru
4. Agar hasilnya bisa ideal sebenarnya biro hukum sudah membuka jalan lewat bimtek hybrid

NOTULEN RAPAT,

ITA YULISTIAWATI
NIP. 19770720 200112 2 005

Rapat Evaluasi Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Tanggal 20 Agustus 2024